

**PENGARUH CITRA POLISI, PENGETAHUAN SISWA
DAN AGRESIVITAS DENGAN KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN LALU LINTAS PADA SISWA
DI BANDAR LAMPUNG**

M. Nursalim*

Intisari

Kepatuhan dalam berlalu lintas adalah kemauan individu untuk mengikuti peraturan atau peraturan yang mengatur aktivitas lalu lintas di jalan raya baik karena faktor internal dan faktor eksternal, atau dengan kata lain pemahaman atau pemaksaan yang baik. Kepatuhan diduga berhubungan dengan citra Polisi, Pengetahuan Siswa dan Agresivitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh antara Citra Polisian, Pengetahuan Siswa dan Agresivitas dengan Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, hipotesis yang diajukan: 1. Ada hubungan antara Citra Polisi, Pengetahuan Siswa dan Agresivitas dengan Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, 2. Ada hubungan antara Citra Polisi dengan Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, dan 3. Ada hubungan antara Pengetahuan Siswa dengan Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, dan 4. Ada hubungan antara Agresivitas dengan Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Populasi penelitian adalah siswa SMK Negeri 1 Bandar Lampung dengan jumlah siswa sebanyak 1452 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Stratified Proportional Random Sampling, dan didapatkan sebanyak 74 siswa sebagai sampel.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes prestasi untuk mengungkap pengetahuan Pelajar dan Skala Psikologis yang terdiri dari; 1 Skala Citra Polisi, 2. Skala Agresivitas dan, 3. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Untuk menguji hipotesis tersebut kita dapat menggunakan teknik statistik Analisis Regresi dengan 3 prediktor. Hasil yang dapat disimpulkan adalah;

1. $R = 0,651$ dan $p = 0,000$ ($p < 1\%$), artinya bersama-sama ada pengaruh antara citra polisi, pengetahuan dan agresivitas siswa dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan

- ketiga variabel tersebut secara efektif berkontribusi 42% terhadap kepatuhan.*
2. *t = 2,602 dengan sig = 0,011 (p <0,05) ada hubungan anatara citra polisis dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas .*
 3. *t = 3,158 dengan sig = 0,002 (p <0,01) artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara pengetahuan siswa dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.*
 4. *t = -5.351 dengan sig = 0,000 (p <0,01) artinya ada korelasi negatif antara agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.*

Kata kunci: Keberatan dalam peraturan lalu lintas, citra Polisi, Pengetahuan Siswa, Agresivitas

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dewasa ini juga telah membawa perubahan dalam pemenuhan kebutuhan terutama di bidang alat transportasi darat khususnya, mobil dan sepeda motor. Sebagai gambaran menurut Ditlantas Polda Lampung diperkirakan pertumbuhan mobil secara nasional sampai akhir 2014 sebanyak 1,7 juta unit dan sepeda motor 7,9 juta unit, dan akan terus tumbuh rata rata 9% per tahun Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seyogyanya diimbangi dengan kemajuan sarana dan prasarana jalan seperti rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain, juga perilaku para pengendara dan masyarakatnya, serta tak kalah pentingnya adalah perilaku penegak hukum yang bersih dan berwibawa Agar kenyamanan dan keamanan dalam berkendara tetap terjamin, mestinya juga ditingkatkan pula kesadaran akan ketertiban dan kedisiplinan berlalu-lintas.

Kedisiplinan berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum, sedangkan pelaksanaan hukum merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Salah satu hal yang sangat menonjol dalam kehidupan yang berkaitan erat dengan disiplin adalah kegiatan sehari-hari di jalan raya. Proses penegakan hukum di jalan raya memiliki lika-liku yang unik yang melibatkan masyarakat

(pemakai jalan), aparat penegak hukum (polisi), dan peraturan dan hukumnya.¹

Transportasi jalan diselenggarakan untuk mewujudkan lalu linta dan angkutan jalan raya dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, aman dan efisien, mampu memadukan mode transportasinya lainnya, menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong pembangunan Nasional.

Kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Problem lalu lintas menjadi problem keseharian masyarakat perkotaan, titik kemacetan lalu lintas makin hari makin meluas. Pelanggaran lalu lintas dapat ditemui di setiap perempatan jalan. Becak, sepeda, bus kota, dan pejalan kaki yang lebih suka memotong arus lalu lintas dari pada melalui tempat penyeberangan. kendaraan roda dua atau roda empat saling serobot yang sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas².

Permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terus berkembang. Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yang cukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Karena kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Lalu disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan dan alam. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan menurut kajian balitbang Kementerian PU sebesar 67% karena *human error* (kesalahan manusia), sedangkan sebesar 33% disebabkan oleh kondisi jalan, lingkungan, cuaca dan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan.³

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Bandar Lampung dapat dilihat melalui tabel yang tertera di bawah ini yaitu jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2013 dan 2014.

¹ Kunarto, 1995. *Merenungi kritik terhadap polri*. Jakarta : Cipta Manunggal, 71

² Maliana Sabirin, 2005. *Lalu lintas jogja perlu solusi*. <http://www.pikiran.rakyat.com/ceta/1204/12/hikmah/utama01.htm>. 10 april 2015

³ (<http://www.menkokesra.go.id/content/rakor-dampak-kecelakaan-lalu-lintasdarat-bagi-kesehatan-sosial-dan-ekonomi>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015)

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

No	Tahun	Jumlah	Korban			Kerugian Materiil
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
1.	2013	302	77	105	307	Rp.1.032.700.000
2.	2014	431	82	135	443	Rp.1.664.750.000

Sumber : Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung 2014

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Bandar Lampung belum dapat diminimalisir. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 lebih banyak jika dibanding tahun 2013. Hal ini pun berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban, baik korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas pun semakin besar jumlahnya.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Bandar Lampung juga lebih didominasi oleh sepeda motor, hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung pada tahun 2014 tentang kecelakaan lalu lintas yakni, pada tahun 2014 jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor adalah 525 kejadian, mobil penumpang 51 kejadian, mobil beban 20 kejadian, bus 2 kejadian dan kendaraan khusus 1 kejadian. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sepeda motor menempati urutan pertama kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan, selain itu jumlah korban meninggal dunia yang diakibatkan karena kecelakaan sepeda motor jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan lain.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi antara lain berkendara tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu sign sepeda motor di siang hari, menerobos lampu merah, dan melanggar marka, berkendara secara ugal-ugalan dan melebihi batas kecepatan serta berkendara tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK. Sedangkan untuk profesi pelanggar lalu lintas tahun 2014 adalah sebagai berikut;

Tabel. 2. Profesi Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2014

No	Jenis	Jumlah Pelanggaran	Profesi Pelanggar Lalu Lintas					
			PNS	Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Pengemudi	Lain-lain
1	Tilang	40.389	120	22.180	4.656	9.026	1.677	2.730
2	Teguran	24.616	162	11.910	3.234	6.825	929	1.556
	Jumlah	65.005	282	34.090	7.890	15.851	2.606	4.286

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Berdasarkan data pada table.2 pelanggaran dilakukan oleh kalangan pelajar 15.851 atau 24,38% yang termasuk usaha produktif, padahal kalangan pelajar merupakan anggota masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara sistematis, pelajar adalah generasi muda yang kelak akan menggantikan tugas para orang tua, guru, dan bahkan dapat menjadi aparat penegak hukum.

Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode "badai dan tekanan" masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjrsr. Ketegangan emosi pada masa remaja yang khas juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang mengelilingi remaja karena mereka berada dibawah tekanan sosial dan kondisi baru, tidak semua remaja mengalami masa "badai dan tekanan" tapi sebagian besar mengalami sebagai konsekwensi dari pola-pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru.

Kunarto berpendapat kepatuhan lalu lintas di kalangan pelajar, disamping ditentukan oleh faktor pemahaman terhadap peraturan dan pelaksanaannya, sikap terhadap keselamatan dan keamanan diri dan pemakai jalan yang lain, sikap dan perilaku hati-hati, serta kesiapan individu dan kendaraan, juga dipengaruhi karakteristik kalangan siswa itu sendiri yaitu ; Perkembangan dan kondisi psikisnya;nya, tingkat pendidikan yang mereka peroleh, situasi yang melingkupi pelaksanaan peraturan perundangan tersebut di lapangan⁴.

SMK Negeri 1 adalah sekolah yang terletak di jalan pulau Morotai yang menghubungkan jalan Pangeran Antasari dengan

⁴ Kunarto, 1995. *Merenungi kritik terhadap polri*, 67

jalan Jend.Urip Sumoharjo. Jalan pulau Morotai bukan jalan raya yang ramai (seperti jalan P.Antasari dan jalan Jend.Urip Sumoharjo) dan banyak terhubung dengan jalan-jalan kecil lainnya dan kondisi ini sangat mendukung siswa-siswi untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015 terhadap beberapa siswa SMK Negeri 1 Bandar Lampung, menunjukkan bahwa siswa SMK Negeri termasuk pelajar yang belum dapat berperilaku patuh di jalan raya. Fenomena kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang rendah terlihat dari pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang kurang, tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan diri serta pemakai jalan yang lain, sikap dan perilaku hati-hati. Siswa SMK Negeri 1 Bandar Lampung juga banyak belum memiliki SIM ada 4 dari 14 siswa atau 29% meski mereka menggunakan kendaraan bermotor dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Natakusuma mengemukakan setiap kejadian kecelakaan di jalan raya berawal dari pelanggaran lalu lintas. Polisi sebagai penegak hukum sudah seharusnya memberikan pembinaan dan penyuluhan pada remaja terutama pelajar di sekolah untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar di jalan raya harus ditindak dengan tegas seperti tidak memakai helm, ngebut, mengemudi saat mabuk, menerjang lampu merah dan pelanggaran lain yang dapat membahayakan pengguna jalan.⁵

Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Tugas polisi lalu lintas (polantas) sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu membina moral bangsa di jalan raya. Tugas utama bagi Polisi semakin berat untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat pada hukum dan prosedurnya yang selama ini cukup buruk dalam masyarakat.

Menurut Kunarto tugas Polantas relatif lebih berat dibandingkan dengan tugas polisi yang lain. Pertama polisi

⁵ Natakusuma Romdhon, 2005. *Pelajar pelaku tertinggi pelanggaran lalu lintas* dalam Suara Merdeka edisi 26 Agustus 2005

merupakan *etalase* hukum dan budaya bangsa, jika polisi baik maka kehidupan masyarakat juga baik. Polantas merupakan *etalase* polisi, apabila satuan ini baik maka satuan yang lain baik. Hal ini dikarenakan polantas yang setiap hari terjun dalam masyarakat, sehingga masyarakat langsung dapat menilai polantas dari sudut pandang masing-masing.⁶

Polisi lalu lintas sudah tercitra mencari "rejeku lebih" maka tugas seolah-olah menjadi nomor dua. Polantas sebenarnya *refleksi* POLRI karena mereka menyanggah misi berat dalam membangun persepsi masyarakat pada hukum dan prosedurnya. Kedua mudahnya pengurusan SIM dengan cara membayar tanpa tes, mengakibatkan banyak pengendara yang tidak layak mengemudi mendapat SIM sehingga menimbulkan permasalahan di jalan raya.

Polisi dinilai sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan pemerintah. Masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah sering melakukan demo yang akhirnya melampiaskannya pada polisi sebagai bentuk kekesalannya. Masyarakat banyak yang tidak puas dengan kinerja polisi. Masyarakat mengeluh apabila berurusan dengan polisi berarti mengeluarkan uang dan melibatkan polisi dalam masalah justru menambah masalah.⁷

Persepsi terhadap polisi adalah cara pandang atau penilaian seseorang terhadap status dan peran polisi yang dilandasi harapan-harapan seseorang terhadap polisi dan kenyataan yang diketahui tentang polisi dalam masyarakat. Seseorang menilai polisi dengan cara mengintegrasikan polisi berdasarkan *konstruk* yang berisi ciri sifat yang ada. Terdapat kecenderungan untuk menggunakan *stereotype* yang ada tentang polisi sebagai landasan untuk membangun kesan tentangnya.⁸

Kepatuhan berlalu lintas di jalan raya dilandasi sikap terhadap peraturan lalu lintas dan situasi pelaksanaan peraturan tersebut. Situasi tersebut meliputi petugas, sarana prasarana, dan

⁶ Kunarto, *Merenungi kritik terhadap polri*, 91

⁷ Manggala. 2005. *Polisi tidak gampang mendulang simpati*. Manggala edisi September 2005 hlm. 7 Yogyakarta.

⁸ Argyle, M. 1994. *The Psychology of Interpersonal Behavior*. Fifty edition, New York : Penguin Books, 102-105

Hukum atau aturan itu sendiri. Petugas dalam menindak pelanggaran yang kurang tegas serta persepsi masyarakat tentang polisi terutama polantas mungkin penyebab ketidak patuhan masyarakat. Kemungkinan yang lain sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai, seperti minimnya rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Selain itu kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas diduga dipengaruhi oleh citra polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas. Citra polisi adalah bagaimana individu mengetahui, menginterpretasi dan mengevaluasi polisi mengenai ciri-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan lain yang ada dalam diri polisi yang akan berpengaruh pada sikap, interaksi, dan perilaku individu terhadap polisi.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behaviour*), dari pengalaman dan penelitian perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasarkan oleh pengetahuan⁹. Agresi merupakan perasaan marah atau permusuhan yang berfungsi sebagai suatu motif untuk melakukan respon berupa perlakuan kasar, penghinaan dan frustrasi¹⁰.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh citra polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas?
2. Seberapa besarkah pengaruh citra polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas?

B. Tinjauan Pustaka

1. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas

Kepatuhan berarti kesediaan dan kesanggupan untuk menerima dan mengikuti perintah pihak yang memegang otoritas,

⁹ Sukidjo Notoatmodjo, 2005, Ilmu Perilaku dan Pendidikan Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, 95-99

¹⁰ Kartono & Gulo, D. 1987. *Kamus Psikologi*. Bandung : Pionir Jaya, 25

Gamson mengatakan kepatuhan (*abedience*) adalah rasa bahwa individu harus melakukan seperti yang diperintahkan oleh otoritas¹¹. Milgram menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan perilaku individu untuk menyetujui dan melakukan setiap perintah atau peraturan yang berlaku di mana dia berada¹².

Peraturan lalu lintas adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan, dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur.

Suekanto mengemukakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya pada dasarnya berisi suruhan, larangan, dan pembolean yang mencakup paling sedikit tiga bidang utama yaitu :

- a. Peraturan mengenai pemakaian jalan yang menyangkut manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara bermotor atau tidak bermotor
- b. Peraturan mengenai sarana angkutan yang digunakan di jalan raya
- c. Peraturan mengenai jalan, khususnya tentang klasifikasi jalan raya, jenis-jenis peraturan, rambu-rambu, dan seterusnya¹³.

Peraturan lalu lintas mencakup semua prosedur yang berisi suruhan, larangan dan pembolean yang menyangkut aktivitas di jalan raya baik berupa undang-undang rambu-rambu, marka jalan, serta petugas yang berfungsi sebagai pengawas, pengatur dan penegak hukum di jalan raya.

2. Citra polisi

Rakhmat mengemukakan citra adalah gambaran realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas¹⁴. Citra adalah dunia menurut persepsi kita, citra keseluruhan informasi yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan. Tagiuri mendefinisikan persepsi

¹¹ Gamson, W. A. 1968. *Power and Discontent*. Hoom wood II : Darsey Press., 87-88

¹² Sears, D. O. 1992. *Psikologi Sosial jilid satu*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 141-143

¹³ Soekanto dan Abdullah. 1999. *Psikologi Hukum*. Jakarta : Pustaka Ilmu, 89

merupakan suatu proses individu untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi obyek atau individu lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifat, kualitasnya, dan keadaan lain yang ada dalam diri individu yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai individu yang dipersepsi¹⁵.

Black mendefinisikan polisi adalah departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan¹⁶. Sadjjono mendefinisikan polisi ialah badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai sebutan dari anggota lembaga.

Citra polisi adalah bagaimana individu mengetahui, menginterpretasi dan mengevaluasi polisi mengenai ciri-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan lain yang ada dalam diri polisi yang akan berpengaruh pada sikap, interaksi, dan perilaku individu terhadap polisi.

Polisi memiliki fungsi menjamin ketertiban dan keamanan, serta pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Peran tersebut mengandung kekuasaan untuk mengawasi, mengatur dan penegakan hukum sehingga dalam praktek pekerjaan polisi bersifat melayani, mendidik dan sekaligus menindak masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Polisi lalu lintas (Polantas) sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Polantas dalam tugasnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi yang lebih luhur adalah membina moral di jalan raya, dan menjaga kepercayaan masyarakat tentang hukum serta prosedurnya yang 'adil'. Polisi merupakan etalase hukum dan budaya bangsa, jika polisi baik maka kehidupan masyarakat juga baik, Polantas merupakan etalase polisi, apabila satuan ini baik maka satuan yang lain baik. Hal ini dikarenakan Polantas yang setiap hari terjun dalam masyarakat, sehingga

¹⁵ Bimo Walgito. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi Revisi Yogyakarta : Andi Offset., 25-26

¹⁶ Sadjjono. 2005. *Hukum kepolisian perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*. Surabaya. Laksbang

masyarakat langsung dapat menilai Polantas dari sudut pandang masing-masing. Polantas sudah tercitra mencari 'rejeeki lebih' maka tugas seolah-olah menjadi nomor dua.

3. Pengetahuan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pengetahuan adalah pengertian, pendapat, aliran, mengerti benar¹⁷. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah pengertian atau mengerti benar tentang sesuatu. Pengertian dapat juga diartikan sebagai penerimaan dengan cermat dari stimuli atau isi pesan secara cermat dari apa yang disampaikan komunikator.

Terkait dengan pengertian pengetahuan merupakan penelaahan berbagai proses kognitif yang difokuskan pada stimuli, terutama terhadap perorangan dan kelompok, yang menjadi inti pendekatan pengetahuan adalah pandangan bahwa persepsi manusia merupakan proses kognitif memandang orang sebagai pengamat yang mengorganisasikan secara aktif, jadi bukan sekedar kotak yang pasif, mereka dimotivasikan kebutuhan untuk mengembangkan kesan yang terpadu dan berarti.

Notoatmojo, mendefinisikan pengetahuan sebagai pengertian atau mengerti benar tentang sesuatu. Pengertian dapat juga diartikan sebagai penerimaan dengan cermat dari stimuli atau isi pesan secara cermat dari apa yang disampaikan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap satu objek tertentu, terbentuknya suatu perilaku baru terutama pada orang dewasa dimulai pada domain kognitif. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behaviour*), dari pengalaman dan penelitian perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasarkan oleh pengetahuan¹⁸.

4. Agresivitas

Secara umum agresi dapat diartikan sebagai suatu serangan yang dilakukan oleh suatu organism terhadap organism lain, obyek lain atau bahkan pada dirinya sendiri. Definisi ini berlaku bagi semua makhluk vertebrata, sementara bagi pihak

¹⁸ Sukidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku*, 103

manusia masalah agresi sangat kompleks karena adanya peranan perasaan dan proses-proses simbolik.

Agresi merupakan perasaan marah atau permusuhan yang berfungsi sebagai suatu motif untuk melakukan respon berupa perlakuan kasar, penghinaan dan frustrasi¹⁹.

Chaplin mendefinisikan agresi sebagai suatu bentuk penyerangan tindakan permusuhan yang diarahkan pada orang atau benda²⁰. Sedangkan Morre dan Fine memberikan pengertian agresi dilihat dari sudut pandang perilakunya²¹. Mereka menyatakan bahwa agresi adalah perilaku kekerasan secara fisik ataupun verbal terhadap objek atau individu lain. Dapatlah diartikan bahwa sasaran perilaku agresi tidak terbatas pada manusia, tetapi juga benda.

Kaplan dan Sadock menyatakan, bahwa agresi adalah tiap bentuk perilaku yang tujuannya menyakiti atau melukai orang lain yang dimotivasi menghindari perlakuan tersebut²². Sementara, Baron dan Byne menyebutkan bahwa perilaku agresi merupakan usaha untuk melukai pihak lain dan dari pihak lain berusaha untuk menghindar²³. Akibat perilaku agresi dapat berupa fisik maupun psikis. Selanjutnya Dayaksini menyatakan bahwa unsur penting dari agresi yakni adanya tujuan atau kesenjangan dalam melakukannya sehingga suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan meskipun menghasilkan agresi bagi orang lain maka ini tidak dimaksudkan dalam agresi²⁴.

Bruno mengatakan bahwa agresi dapat terlihat pada waktu seorang remaja menyerang orang lain atau benda secara fisik atau secara verbal dengan nada permusuhan. Seperti halnya terjadi pertengkaran, saling melempar ejekan dan saling memaki. Bila perdebatan semakin sengit, remaja menjadi naik pitam dan saling

²⁰ Chaplin, 2001. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terjemahan. Jakarta : Rajawali.

²¹ Koswara, *Teori Agresi*, Bandung ; Tarsito, 57

²² Kaplan & Sadock. 1997. *Sinopsis Psikiatri*. Alih bahasa. Widjaya Kusuma. Jakarta. Binarupa Aksara., 45

²³ Rahmawati

²⁴ Dayaksini, T & Hudaniyah. 2003. *Psikologi Sosial*. Malang : UMM Press, 65

melempar²⁵. Sikap di atas telah menunjukkan agresi yang sering terjadi pada remaja.

5. Pengaruh antara Citra Polisi, Pengetahuan dan Agresivitas dengan Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas

Individu dalam berperilaku patuh dipengaruhi oleh faktor eksternal (tekanan sosial) dan faktor internal (personal) merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu seperti tanggung jawab, kepribadian, kognitif, dan kondisi psikologis. Proses kognitif meliputi penerimaan dan penyimpanan informasi, perhatian, persepsi dan ingatan. Sears mengemukakan penilaian memainkan peranan penting pada kepatuhan²⁶.

Sears mengatakan yang paling penting dalam kepatuhan adalah adanya pemegang otoritas yang sah dalam situasi itu sesuai dengan norma sosial yang berlaku, yang dimaksud legitimasi adalah keyakinan umum bahwa pihak otoritas mempunyai hak untuk menuntut kepatuhan terhadap perintahnya. Freidrich mengatakan bahwa kepatuhan pada otoritas akan terjadi jika perintah dilegitimasi dalam konteks peraturan dan nilai-nilai²⁷. Polisi lalu lintas (Polantas) adalah pemegang otoritas yang sah di jalan raya dan peraturan lalu lintas merupakan peraturan standar yang berlaku dalam masyarakat ketika di jalan raya.

Polantas memiliki fungsi menjamin ketertiban dan keamanan, serta pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Peran tersebut mengandung kekuasaan untuk mengawasi, mengatur, dan penegakan hukum sehingga dalam praktek pekerjaan polisi bersifat melayani, mendidik dan sekaligus menindak masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Informasi yang dimiliki individu tentang polisi memiliki peran yang penting dalam penilaian individu tentang polisi misalnya polisi bersifat rasis, polisi tidak tegas dalam menindak pelanggar hukum dan sebagainya. Proses evaluasi atau interpretasi berdasarkan informasi yang dimiliki individu disebut persepsi. Wilson mengemukakan, ketika individu memiliki alasan untuk percaya bahwa sistem yang ada tidak adil misalnya polisi bersikap rasis, maka perilaku patuh hukum dan

²⁶ Sears, *Psikologi Sosial*, 75

kepercayaan pada sistem akan menurun²⁸. Darley menambahkan, sama halnya ketika ada perbedaan antara rasa keadilan yang dipersepsikan oleh rata-rata individu dengan hukum yang berlaku, individu cenderung mengabaikan hukum dan penegaknya²⁹. Woodbury mengemukakan, prosedur atau tindakan yang dilakukan oleh polisi mempengaruhi persepsi tentang hukum dan keadilan.

Tagiuri mendefinisikan persepsi merupakan suatu proses individu untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi obyek atau individu lain yang dipersepsi.³⁰ Sadil berkeyakinan bahwa persepsi dianggap mempunyai implikasi yang penting untuk bertingkah laku dan sangat menentukan bagaimana individu itu bersikap dan berinteraksi dengan individu atau obyek yang dipersepsi tersebut, apabila orang mempunyai anggapan tertentu mengenai polantas, maka hal itu akan menentukan reaksi orang tersebut terhadap Polantas, baik untuk mengontrol maupun untuk menentukan reaksinya.³¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap polisi dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Persepsi yang positif terhadap polisi dapat mendorong individu untuk patuh pada aturan dan hukum yang ada demikian juga sebaliknya persepsi yang negative dapat membuat individu untuk mengabaikan hukum dan penegaknya.

6. Hipotesis

Penelitian ini mengajukan hipotesis yaitu :

- a. Hipotesis Mayor ; Ada pengaruh antara citra polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.
- b. Hipotesis minor :
 - 1). Ada hubungan positif antara citra polisi dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Semakin positif citra polisi

²⁸ Baron and Byrne. 2005. *Psikologi Sosial Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Erlangga, 112

²⁹ Baron and Byrne. 2005, *Psikologi Sosial*, 117

³⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi* , 32

³¹ Sadli, 1977. *Persepsi Sosial mengenai perilaku menyimpang*. Jakarta : Bulan Bintang., 81

semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas,

- 2) Ada hubungan positif antara pengetahuan siswa dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, semakin tinggi pengetahuan siswa maka akan semakin patuh terhadap peraturan lalu lintas dan sebaliknya.
- 3) Ada hubungan negative antara agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Semakin tinggi tingkat agresivitas maka akan semakin tinggi pula untuk melanggar peraturan lalu lintas dan sebaliknya.

C. Metode Penelitian

1. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Subyek penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik sampling *Stratified Proporsional Random Sampling*, ditetapkan jumlah sample $5\% \times 1452 = 72,6$ dibulatkan menjadi 74 siswa, selanjutnya dibuat proporsional yang berstrata berdasarkan kelas yang akhirnya diperoleh sebagai subyek adalah dari kelas 1 = 15 siswa, kelas 2 = 22 siswa dan kelas 3 = 37 siswa

Metode pengumpulan data mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel-variabel yang akan diteliti (Azwar, 2003). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa skala psikologis terdiri dari ; 1. Skala Citra Polisi, 2. Skala Agresivitas, 3. Skala Kepatuhan dan 4. Tes Prestasi Pengetahuan siswa

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu untuk melihat adanya pengaruh Antara Citra Polisi, Pengetahuan siswa dan Agresivitas dengan Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, maka tehnik analisis yang tepat diperguna adalah teknik Analisis Regresi dengan tiga prediktor.

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil $R = 0,651$ dengan $p < 0,01$, berarti secara bersama-sama ada hubungan yang signifikan antara citra polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, hal ini menunjukkan hubungan yang positif dan sangat signifikan antara variabel citra terhadap polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Semakin positif

citra terhadap polisi dan tingginya pengetahuan siswa terhadap peraturan lalu lintas akan membuat siswa akan patuh terhadap peraturan lalu lintas dan semakin rendah tingkat agresivitas maka akan semakin patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Adapun hasil untuk masing-masing variabel diperoleh hasil $t = 2,602$ dengan $\text{sig} = 0,011$, ada hubungan antara citra polisi dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, artinya semakin positif citra terhadap polisi, maka akan diikuti dengan semakin tinggi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Begitu pula sebaliknya semakin negatif citra polisi diikuti dengan semakin rendah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Untuk hipotesis minor kedua diperoleh hasil $t = 3,158$ dengan $\text{sig} = 0,002$ ($p < 0,01$) berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara pengetahuan siswa dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, jika siswa memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas maka siswa akan memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas dan sebaliknya jika pengetahuan siswa rendah maka akan rendah pula tingkat kepatuhan. Dan untuk hipotesis minor ke tiga didapatkan hasil $t = -5,351$ dengan $\text{sig} = 0,000$ ($p < 0,01$) berarti ada hubungan negatif antara agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, semakin tinggi agresivitas maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan dan sebaliknya jika tingkat agresivitas rendah maka akan tinggi tingkat kepatuhan peraturan lalu lintas.

Adanya hubungan positif antara ketiga variabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, Milgram mengatakan elemen kognitif memainkan peranan penting dalam kepatuhan terutama penilaian. Seseorang menilai orang lain akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan harapan. Kesan yang terbentuk tentang individu lain dilandasi pengetahuan hidupnya dalam berinteraksi dengan individu tersebut, dimensi pengetahuan, harapan, ataupun penilaian saling mempengaruhi satu sama lain. Pengetahuan individu tentang individu lain akan bertambah atau mempengaruhi bagaimana pengetahuan individu tentang individu lain dilandasi pengetahuan dan harapan individu tersebut³².

Sears mengatakan hal yang paling penting dalam kepatuhan adanya pemegang otoritas yang sah dalam situasi itu

³² Sears, *Psikologi Sosial*, 101

sesuai dengan norma sosial yang berlaku, seseorang otoritas memiliki hak untuk menuntut kepatuhan dari perintahnya. Polisi lalu lintas adalah pemegang otoritas sah dalam situasi itu yang mempunyai kekuatan hukum dan hak *legitimasi* untuk menuntut kepatuhan terhadap perintahnya³³. Orang mematuhi perintah karena percaya bahwa dirinya harus melakukan apa yang diperintah oleh otoritas³⁴, Tyler mengemukakan orang akan mematuhi hukum dan menerima keputusan otoritas selama mereka percaya bahwa hukum dan prosedurnya “adil” (*fair dan just*). Wilson mengatakan ketika orang memiliki alasan untuk percaya bahwa hukum dan sistem yang ada tidak adil maka perilaku patuh hukum dan kepercayaan mereka pada hukum menurun, dan orang-orang cenderung untuk mengabaikan hukum dan aparat penegak hukum.

Woodbury mengatakan prosedur atau perilaku yang dilakukan oleh polisi akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang hukum dan keadilan. Dali persepsi mempunyai implikasi penting untuk bertingkah laku, dan sangat menentukan bagaimana individu itu bersikap dan berinteraksi dengan individu atau obyek yang dipersepsi tersebut. Ketika seseorang mempersepsi polisi buruk misalnya polisi bersikap rasis atau yang lain, hal ini akan mempengaruhi sikap orang tersebut pada polisi atau hal lain yang berkaitan erat dengan polisi, misalnya perilaku patuh³⁵.

Peneliti juga melakukan analisis untuk mengetahui berapa besar sumbangan efektif variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tergantung. Citra terhadap polisi dan pengetahuan siswa dan agresivitas secara bersama-sama memberikan sumbangan efektif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebesar 42,3 % (R square 0,423 x 100%), berarti sisanya 57,7% adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang tidak masuk dalam penelitian ini.

³³ Sears, Psikologi Sosial, 109

³⁴ Gamson, W. A. 1968. *Power and Discontent*. Hoom wood II : Darsey Press.

³⁵ Kartono & Gulo, D. 1987. *Kamus Psikologi*. Bandung : Pionir Jaya

Selain itu nilai statistic deskriptif untuk variabel Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang termasuk kategori tinggi ada 28 siswa (38%), kategori sedang 42 siswa (57%) dan yang rendah hanya 4 siswa (5%), mayoritas subyek (43,62%) berada dalam kategori sedang. Untuk kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas mayoritas siswa yang memiliki SIM 72% (13 siswa) termasuk kategori patuh, dan hanya 5 siswa termasuk kategori sedang 28%.

E. Penutup

Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil dengan kesimpulan :

1. Ada hubungan antara citra polisi ,pengetahuan dan agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Citra terhadap polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas secara bersama-sama memberikan sumbangan efektif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebesar 42,38%. Artinya citra polisi, pengetahuan siswa dan agresivitas memberi pengaruh positif sebesar 42,38 % dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sisanya 57,62 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.
2. Ada hubungan antara citra polisi dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, artinya semakin positif citra terhadap polisi, maka akan diikuti dengan semakin tinggi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Begitu pula sebaliknya semakin negatif citra polisi diikuti dengan semakin rendah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas
3. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, artinya semakin tinggi pengetahui siswa mengenai peraturan lalu lintas maka akan semakin tinggi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, begitu pula sebaliknya semakin rendah pengetahui siswa mengenai peraturan lalu lintas maka akan semakin rendah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas
4. Ada hubungan negatif antara agresivitas dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, semakin tinggi agresivitas siswa maka akan semakin tinggi pelanggaran terhadap lalu lintas dan sebaliknya semakin rendah nilai agresivitas maka semakin patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Rekomendasi

1. Untuk siswa

Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah hal yang sangat penting sebagai wujud pelaksanaan dari UU tentang lalu lintas, maka diharapkan kepada siswa untuk mentaati peraturan lalu lintas diantaranya pengendera harus memiliki SIM. Selain itu siswa juga bisa mengadakan kegiatan ekstra kulikuler dengan bentuk PKS (polisi keamanan sekolah)

2. Untuk kepolisian

Polisi sebagai penegak hukum sudah seharusnya memberikan pembinaan dan penyuluhan pada remaja terutama pelajar di sekolah-sekolah untuk mematuhi rambu lalu lintas, karena setiap kejadian kecelakaan di jalan raya berawal dari pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar di jalan raya harus ditindak dengan tegas seperti pemakaian helm, ngebut, mengemudi saat mabuk, menerjang rambu-rambu lalu lintas dan pelanggaran lain yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, kalangan pelajar merupakan anggota masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara sistematis, pelajar adalah generasi muda yang kelak akan menggantikan tugas para orang tua, guru, dan bahkan dapat menjadi aparat penegak hukum

3. Untuk peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini bahwa citra polisi dan pengetahuan siswa memberikan pengaruh positif kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa citra terhadap polisi mempunyai peranan penting pada perilaku individu dibidang kepatuhan. Melihat hal tersebut penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat melibatkan variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan perilaku masyarakat pada bidang kepatuhan, misalnya ; ganjaran dan hukum, contoh atau model serta norma sosial

Daftar Pustaka

- Argyle, M. 1994. *The Psychology of Interpersonal Behavior. Fifty edition*, New York : Penguin Books
- Azwar. 2003. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta : Andi Offset

- Baron and Byrne. 2005. *Psikologi Sosial Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Erlangga.
- Chaplin, 2001. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terjemahan. Jakarta : Rajawali.
- Dayakisni, T & Hudaniyah. 2003. *Psikologi Sosial*. Malang : UMM Press
- Davidoff, L. D. 1991. *Psikologi Suatu Pegantar Edisi Kesatu*. Jakarta : Erlangga
- _____, 1991. *Psikologi suatu pengantar edisi kedua*. Jakarta : Erlangga
- Departemen Perhubungan RI. 1993. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gamson, W. A. 1968. *Power and Discontent*. Hoom wood II : Darsey Press.
- Hadi, S. 2000. *Metodologi Research, Jilid 1*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- _____, 2000. *Metodologi Research, jilid 2*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Kartono & Gulo, D. 1987. *Kamus Psikologi*. Bandung : Pionir Jaya
- Kaplan & Sadock. 1997. *Sinopsis Psikiatri*. Alih bahasa. Widjaya Kusuma. Jakarta. Binarupa Aksara.
- Kunarto, 1995. *Merenungi kritik terhadap polri*. Jakarta : Cipta Manunggal.
- Maliana Sabirin, 2005. *Lalu lintas jogja perlu solusi*. <http://www.pikiran.rakyat.com/ceta/1204/12/hikmah/utama01.htm>. 10 april 2015.
- Manggala. 2005. *Polisi tidak gampang mendulang simpati*. Manggala edisi September 2005 hlm. 7 yogyakarta.
- Natakusuma Romdhon, 2005. *Pelajar pelaku tertinggi pelanggaran lalu lintas dalam Suara Merdeka edisi 26 agustus 2005*
- Sadjijono. 2005. *Hukum kepolisian perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*. Surabaya. Laksbang
- Sadli, 1977. *Persepsi Sosial mengenai perilaku menyimpang*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sears, D. O. 1992. *Psikologi Sosial jilid satu*, Jakarta : Penerbit Erlangga

- _____, 1994. *Psikologi Sosial jilid dua*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Sobur, A. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia
- Soekanto dan Abdullah. 1999. *Psikologi Hukum*. Jakarta : Pustaka Ilmu.
- Subroto. 2005. *Disiplin Masyarakat dalam berlalu lintas perlu ditingkatkan* dalam mangala edisi September 2005. Hlm. 11. Yogyakarta.
- Suharnan. 2005. *Psikologi Kognitif*. Jakarta : Srikandi
- Utomo, W. H. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Walgito, B. 1999. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta : penerbit Andi Offset.
- _____, B. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi Revisi Yogyakarta : Andi Offset.

*Drs. M. Nursalim, M.Si adalah dosen tetap Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. Alumni Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, saat ini sedang melanjutkan ke program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.